

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk mengembangkan potensi individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam proses pendidikan, individu diberi ruang untuk mendapatkan dan mengembangkan pengalaman hidup, dengan tujuan membentuk manusia yang lebih bermakna. Maka dari itu, pendidikan menjadi fokus utama yang mendapatkan perhatian lebih oleh berbagai pihak karena perannya yang begitu vital dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses kehidupan itu sendiri.

Secara umum, pendidikan merupakan usaha untuk membentuk kepribadian seseorang berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan budaya. Zaharai Idris dalam Abd Rahman, dkk. (2022) menyatakan bahwa pendidikan adalah rangkaian kegiatan komunikasi yang terencana, antara orang dewasa dengan anak didik secara langsung ataupun melalui media, yang bertujuan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya diemban oleh pemerintah, namun juga keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan dinamika kehidupan serta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Masalah-masalah pendidikan juga kian kompleks, seperti rendahnya mutu pendidikan, keterbatasan anggaran, ketimpangan akses, hingga mahalnya biaya pendidikan (Bakar, 2015 dalam Jamaluddin, J., Quthny, Y. A., & Bahrudin, B., 2022).

Menurut Jamaluddin, J., Quthny, Y. A., & Bahrudin, B. (2022), tingkat pendidikan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan struktur sosial desa tersebut. Bentuk dan susunan desa serta nilai-nilai sosial budayanya sering kali berperan besar. Di banyak desa, termasuk Desa Cisadap, mayoritas warganya hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SLTA, bahkan ada yang hanya lulus sekolah dasar dan tidak melanjutkan. Pengetahuan mereka pun terbatas, sebagian besar bekerja membantu orang tua di ladang, bekerja di pabrik,

atau merantau. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa ini.

Dalam kehidupan sosial, pola pikir dan persepsi masyarakat sangat berperan dalam memahami lingkungan sekitar. Menurut Robbins dan Stephen (2007, hlm. 174–184) dalam Lismayanti (2023), persepsi adalah proses individu dalam mengatur dan menafsirkan kesan sensorik untuk memahami lingkungan. Tindakan seseorang lebih sering didasarkan pada persepsinya terhadap kenyataan daripada kenyataan itu sendiri. Persepsi membentuk kesan terhadap orang lain berdasarkan informasi lingkungan serta sikap yang sudah dimiliki sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang. Dalam konteks pendidikan, berbagai hal seperti rendahnya minat anak untuk melanjutkan sekolah, lebih memilih bekerja, atau menganggap ijazah hanya sebagai syarat kerja semata mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih sangat rendah. Ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan.

Perlu disadari bahwa belum semua masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan biaya. Mahalnya biaya pendidikan mendorong keluarga miskin untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya, dan lebih memilih agar anak-anak bekerja demi menopang ekonomi keluarga. Meskipun berbagai upaya program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan dana bantuan penunjang pendidikan telah diimplementasikan, angka keterlibatan masih tergolong rendah, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga miskin.

Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dan minimnya akses pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai bentuk bantuan sosial. Sejak masa Presiden Soekarno hingga era Presiden Jokowi, salah satu inisiatif penting yang dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Aulia Dinda Tasya (2024) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial dengan persyaratan tertentu yang ditujukan kepada keluarga miskin yang telah terverifikasi sebagai penerima, dengan tujuan

mengurangi beban pengeluaran dan mendorong peralihan pola perilaku dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui persyaratan tertentu, PKH mendorong partisipasi aktif penerima manfaat dalam bidang sektor pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurut Nyi, R., dkk (2019), PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang dirancang sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses pendidikan yang lebih baik, mereka berpeluang memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial di masa mendatang.

Sebagai program bersyarat, PKH mewajibkan keluarga penerima manfaat untuk mengikuti layanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil dan balita, serta memastikan kehadiran anak-anak di sekolah minimal 85%. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, penyaluran bantuan bisa ditangguhkan.

Komponen pendidikan dalam PKH memberikan peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan. Bantuan ini membantu mengurangi hambatan biaya sehingga memungkinkan anak-anak dari keluarga penerima manfaat untuk melanjutkan sekolah. Tujuan jangka panjangnya untuk mengupayakan optimalisasi cakupan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah pertama (SMP), serta mengurangi kasus pekerja anak di Indonesia.

Pemanfaatan bantuan pendidikan oleh KPM PKH sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya guna mendorong kemandirian. Orang tua diharapkan memiliki kesadaran dan motivasi untuk mendukung pendidikan anaknya, sehingga mereka memiliki keterampilan dan tidak lagi tergantung pada bantuan sosial. Program ini juga bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan guna mendukung program wajib belajar 12 tahun serta menekan angka pekerja anak. Syarat

utamanya adalah memastikan anak-anak terdaftar sebagai peserta didik dan memiliki kehadiran yang cukup selama proses belajar berlangsung. PKH diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial. Program ini juga mencakup beberapa kegiatan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bansos Rastra, P2K2, dan Bantuan Tunai.

Meskipun berbagai strategi sudah dilakukan, angka partisipasi sekolah di kalangan keluarga sangat miskin masih belum optimal. Komponen pendidikan PKH bertujuan mendorong anak-anak dari keluarga ini agar tetap sekolah dan mengurangi angka pekerja anak, terutama di jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Program ini memotivasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk memenuhi komitmen kehadiran anak di sekolah.

Berdasarkan data tahun 2011, masyarakat Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis terdaftar sebagai penerima PKH dan harus melalui proses administratif untuk mendapatkan dokumen seperti akta kelahiran, KTP, dan KK. Namun, kendala administratif sering kali menjadi penghambat, sehingga bantuan tidak digunakan sesuai tujuannya. Menurut koordinator PKH Desa Cisadap, Bu Riyan, penerima bantuan tersebar di enam dusun: Dusun I (33 orang), Dusun II (47 orang), Dusun III (25 orang), Dusun IV (35 orang), Dusun V (19 orang), dan Dusun VI (29 orang). Namun, dalam laporan pendataan terakhir, hanya tercatat 97 penerima dari tiga dusun, yakni Dusun I, IV, dan VI. Bantuan PKH seharusnya digunakan untuk pendidikan dan layanan kesehatan, namun kenyataannya masih banyak yang menggunakannya untuk keperluan lain seperti membayar utang, membeli mainan, gadget, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan.

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan, termasuk minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Meskipun pemerintah telah menyediakan dana pendidikan bagi anggota KPM, banyak dari mereka yang belum menyadari pentingnya pengelolaan dana tersebut untuk pendidikan anak-anaknya. Berdasarkan kondisi ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul:

"Persepsi Anggota Keluarga Penerima Manfaat dalam Memanfaatkan Dana Pendidikan Program Keluarga Harapan."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah berikut dapat diidentifikasi sebagai terkait dengan penelitian ini:

- 1) Kurangnya pemahaman anggota KPM terkait pentingnya pendidikan.
- 2) Pemanfaatan bantuan PKH digunakan tidak sesuai dengan tujuan PKH untuk pendidikan.
- 3) Kurangnya sosialisasi terhadap ketidaksesuaian antara kebutuhan dan bantuan yang diberikan

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, fokus permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana persepsi anggota Keluarga Penerima Manfaat dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis Jawa Barat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu teoritis dan praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai upaya memperluas pengetahuan masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya terkait dengan pendidikan di keluarga.
- 2) Untuk menjadi referensi dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengembangan pada penelitian berikutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang yang diteliti. Melalui pelaksanaan penelitian ini, peneliti dapat secara langsung memahami dan mengamati bagaimana persepsi keluarga penerima manfaat

dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis Jawa Barat.

- 2) Bagi keluarga penerima manfaat (KPM), sebagai motivasi untuk lebih efektif lagi memanfaatkan dana bantuan untuk kepentingan pendidikan.
- 3) Bagi pemerintah daerah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya dalam meningkatkan kesadaran keluarga penerima manfaat PKH.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1 Persepsi

Persepsi adalah suatu proses internal yang terjadi dalam diri individu untuk memahami serta menilai orang lain. Melalui proses ini, seseorang membentuk pandangan atau penilaian terhadap individu lain. Pandangan tersebut dibangun berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar serta dipengaruhi oleh sikap atau pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan yang diterima. Dalam perspektif yang dimaksud disini adalah kurangnya persepsi warga desa Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis Jawa Barat dalam memanfaatkan dana bantuan PKH dalam menunjang pendidikan.

1.6.2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan dapat mengakses serta memanfaatkan layanan sosial dasar secara optimal, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk memperoleh akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat komplementer dan berkelanjutan. Dalam penelitian kali ini saya mengambil sample sesuai fakta yang ada di lapangan di 3 dusun, Cisadap dengan anggota KPM 33 orang, Dusun Puncakasih dengan anggota KPM 35 orang dan Dusun Selaawi dengan anggota KPM 29 orang. Berdasarkan data yang di dapat 3 dusun tersebut yang memiliki kualitas pendidikan paling rendah diantara dusun lainnya. Mayoritas masyarakat kurang terhadap keinginan untuk belajar dan sekolah maka dari itu banyak masyarakat yang memilih langsung bekerja menjadi buruh di pabrik-pabrik sekitar desa atau dusun. Tingkat pemahaman penerima manfaat terhadap program bantuan PKH sangat bervariasi.

Banyak ditemukan beberapa anggota KPM yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai KPM, edukasi dan sosialisasi menjadi suatu hal yang penting untuk pemahaman masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan.

1.6.3 Dana Pendidikan

Biaya pendidikan merupakan sejumlah pengeluaran, baik dalam bentuk uang, barang, maupun pengorbanan lainnya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pihak penyelenggara pendidikan, masyarakat, atau orang tua siswa. Pengeluaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan sumber biaya yang ada, biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan dan masyarakat. Jumlah dana yang diberikan berbeda-beda tergantung pada jenjang Pendidikan. Untuk anak SD/Sederajat mendapatkan uang senilai Rp225.000 per 3 bulan, untuk anak SMP/Sederajat mendapatkan Rp375.000 per 3 bulan, dan untuk anak SMA/Sederajat mendapatkan Rp500.000 per 3 bulan.

Namun, dilapangan sering kali terjadi keterlambatan pencairan dana, yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan anak-anak KPM. Terutama untuk kebutuhan operasional sekolah seperti seragam, buku, dan biaya kegiatan sekolah. Selain itu, seharusnya dana pendidikan disalurkan untuk mendukung keperluan sekolah, dalam praktiknya tapi penggunaan dana oleh KPM kadang tidak sesuai dengan tujuan awal. Beberapa keluarga menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti kebutuhan pangan atau biaya kesehatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tekanan ekonomi di keluarga penerima manfaat, yang sering kali membutuhkan dana untuk keperluan sehari-hari.

1.6.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau disebut juga kemensos. Keluarga yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat

(KPM). Tujuan utama dari PKH adalah membantu meringankan beban ekonomi, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kualitas hidup masyarakat dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi jangka panjang.

Bantuan yang diberikan melalui program ini disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui lembaga perbankan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Penyaluran dana dilakukan secara rutin, biasanya setiap dua bulan untuk bantuan pendidikan. Besaran bantuan yang diterima masing-masing KPM bergantung pada jumlah individu dalam unit keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat, seperti anak usia pada usia wajib belajar, lansia, ibu hamil, maupun penyandang disabilitas berat. Di wilayah perkotaan, proses pencairan dana umumnya berjalan lancar karena akses ke fasilitas perbankan yang memadai. Namun, di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, pencairan kerap mengalami hambatan, seperti jarak tempuh yang jauh ke bank, terbatasnya infrastruktur penunjang, hingga gangguan teknis pada sistem perbankan.